

<b>Tujuan</b>	
<b>Indikator Tujuan</b>	

<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
<b>Indikator Sasaran</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
<b>Definisi Operasional</b>	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

<b>(sasaran eselon III)</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi</b>	<b>Meningkatnya pengawasan internal</b>
<b>Indikator Sasaran Eselon III</b>	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada E
<b>Definisi Operasional</b>	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada E

<b>Sasaran Eselon IV</b>	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi DOKumen Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu	Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan	Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan
--------------------------	--	---	--	--	---	--	--	---

<b>Indikator sasaran Eselon IV</b>	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian DOKumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yg disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan	Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah	Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan	Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
<b>Definisi Operasional</b>	jumlah laporan audit, reviu, monitoring dan evaluasi kinerja pemda	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang diterbitkan	jumlah LK PD yang direviu	Dokumen Pelaporan Organisasi terdiri dari 5 Laporan yaitu: Laporan Kinerja (LKJ), LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan BMD)	Sebuah laporan dianggap sudah sesuai jika memperoleh nilai 2 (sesuai sistematis= 1, isi laporan tepat/sesuai ketentuan=1)	Hasil evaluasi SAKIP (tahun n) terkait pelaporan kinerja yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kinerja (tahun n+1)	((Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun n - Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)) : Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)) X 100%	Temuan pemeriksaan yang berasal dari pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh inspektorat dan BPK

**Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani**

- 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

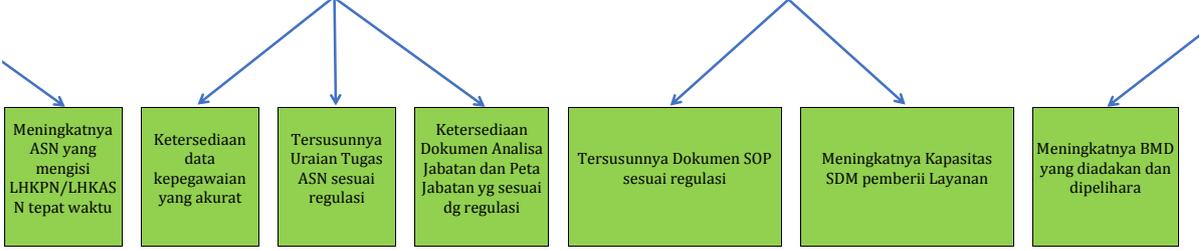
**Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**

**Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi**

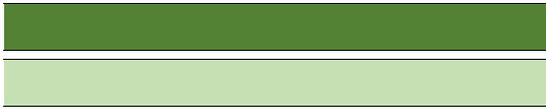
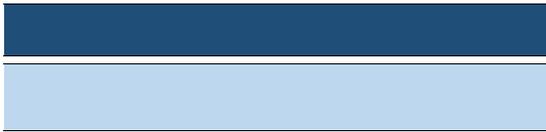
**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat**



Indikator	Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara
Evaluasi SAKIP	Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan	1. Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP 2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP 3. Persentase Layanan Sapras sesuai SOP	1. Persentase 2. Persentase Pemenuhan
Evaluasi SAKIP	tingkat kesesuaian penempatan pegawai di suatu OPD dengan Peta Jabatan yang telah ditetapkan.	1. Layanan administrasi kepegawaian (usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, SK KGB, dan Surat Cuti) 2. Layanan surat menyurat (layanan untuk memproses surat masuk dan surat keluar yang tata kelolanya sesuai dengan SOP) 3. Layanan Saarana Prasarana d(Layanan pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang yang tupoksi pengelolaannya diampu oleh Bagian Umum)	1. ketersediaan Barang dalam 2. seberapa mampu O saprasnya untuk men



Indikator	Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu	Ketersediaan data kepegawaian yang akurat	Tersusunnya Uraian Tugas ASN sesuai regulasi	Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi	Tersusunnya Dokumen SOP sesuai regulasi	Meningkatnya Kapasitas SDM pemberi Layanan	Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara
Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu	Persentase ketersediaan data kepegawaian	Dokumen Uraian tugas yg sesuai regulasi	1. Dokumen Anjab yg sesuai dg regulasi 2. Dokumen Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi	Dokumen SOP yg sesuai regulasi	Jumlah SDM layanan yang kompeten	1. Jumlah Aset yg diadakan 2. Jumlah Aset yg dipelihara 3. Persentase Aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan	
Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu	Data kepegawaian yang tersedia meliputi: Nama, NIP, Jabatan, Informasi Pendidikan, Informasi Diklat, Riwayat workshop/Seminar/Bimtek/Sosialisasi, SKP dan Penilaiannya, dll	dokumen uraian tugas yang dipedomani oleh OPD sesuai Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan pada OPD bersangkutan	1. Anjab telah disahkan oleh Pimpinan OPD dan telah melalui proses verifikasi oleh Biro Organisasi. 2. Peta Jabatan telah di sah kan oleh pimpinan OPD dan telah melalui proses verifikasi oleh Biro Organisasi	Dokumen SOP yang telah disusun oleh OPD, telah di sahkan oleh Kepala OPD dan telah melalui proses verifikasi oleh Biro Organisasi	SDM layanan yang bisa memberikan layanan sesuai dengan SOP layanan yang ditetapkan	1. aset/Belanja Modal yang dibeli pada tahun n 2. BMD yang di lakukan pemeliharaan (Serve, Rehab) pada tahun n. 3. BMD dengan kondisi Rusak (tidak bermanfaat) yang telah dihapuskan OPD pada tahun n	



t

